

Nilai Kearifan Lokal dalam Perilaku Politik Studi Analitis tentang Etika dan Sikap Berpolitik Santri di Madura

Mohammad Suhaidi¹ Sihabuddin²

STKIP PGRI Sumenep, Madura - Indonesia

Abstract

The advantage of Islamic Boarding politicians is their ability to preserve the typical Islamic characteristics values; those are ethics and modesty towards the *Kiai* and *Ulama* as their teachers. The majority of the Madurese people make *Ulama* as a role model. Obedience to the *Kiai* is a form of respect that becomes the identity of *Santri*, including *santri* who are involved in practical politics. The uniqueness of *santri* (santri politicians) when determining the political decision cannot be separated from the blessing from the *Kiai*, even though they participated in different political party. The *Kiai*'s blessing is essentially a political capital that can strengthen its existence in the political competition. The characteristics of *santri* are to remain *istiqomah* in the making of local wisdom value as the basis of politics. *Buppa 'Bappu', Gurur, ratoh* has become an integral part of every political taken step. Getting the blessing from the *Kiai* who has been united in *pesantren* becomes a necessity made by *bhindara*. There are two things to get the blessing from *Kiai*, First, a direct approval from *Kiai* by *acabis* or *sowan* to the *Kiai*. Second, an approval through *Kiai*'s sons, by communicating to the *Kiai*'s son about his political choice.

Salah satu kelebihan politisi pesantren adalah kemampuannya dalam menjaga karakteristik nilai-nilai pesantren yang khas, yaitu etika dan kesopanan terhadap *kiai* dan *ulama* yang menjadi gurunya. Sebagaimana masyarakat Madura secara umum, *ulama* adalah panutan yang diposisikan cukup terhormat. Taat dan patuh kepada *kiai* adalah bentuk penghormatan yang menjadi identitas kalangan *santri*, termasuk *santri* yang terlibat dalam politik praktis. Keunikan politisi pesantren dalam menentukan arah politik tidak lepas dari upaya mendapatkan restu dari sang *kiai*, sekalipun ia harus berbeda partai dengan *kiai*. Restu *kiai* pada hakikatnya menjadi modal politik yang bisa memperkuat eksistensinya dalam pergulatan politik yang dilakukan. Karakteristik *santri* adalah tetap *istiqomah* dalam menjadikan nilai kearifan lokal sebagai dasar berpolitik. *Buppa' Bappu',guruh, ratoh* telah menjadi bagian integral dalam setiap langkah politik yang dilakukan. Mendapatkan restu dari seorang *kiai* yang telah membesarkannya di pesantren, menjadi keniscayaan dilakukan oleh politisi pesantren. Upaya mendapatkan restu tersebut dilakukan dengan dua hal. *Pertama*, restu langsung dari *kiai* dengan cara *acabis* dan *sowan* dengan *kiai*. *Kedua*, restu melalui putra-putra *kiai*, yang dilakukan dengan cara menyampaikan kepada putra *kiai* tentang pilihan politik yang diyakininya.

Keywords: Values, Local Wisdom, *Kiai* and *Bhindara*

¹**Korespondensi:** Mohammad Suhaidi (emsuhaidi27@gmail.com), Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Gedung, Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451.

² **Korespondensi:** Sihabuddin, Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Gedung, Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451.

Pendahuluan

Dominasi santri dalam pergulatan lokal telah memberikan warna baru dalam dinamika sosial politik yang ada. Santri yang pada awalnya dianggap sebagai masyarakat tradisional dan hanya memiliki pemahaman yang kuat, ternyata telah membalikkan fakta, karena ternyata kalangan santri telah menjadi pihak yang paling dominan dalam kekuasaan politik, secara khusus dalam pergulatan politik lokal Madura. Para santri tidak lagi menjadi penonton dari aksi para politisi yang lain, tetapi telah menjadi bagian dari permainan politik yang dilakukan. Bahkan, tidak jarang, *para santri* menjadi pemain penting dalam sebuah pergulatan politik yang berlangsung.

Pasca reformasi, dimana kran politik dibuka sangat lebar, kalangan santri telah melakukan penyebaran peran politik yang tidak terbatas, bukan hanya dalam partai berbasis pesantren (Islam), tetapi juga dalam partai nasionalis dan partai-partai yang tidak se-ideologi dengan ajaran pesantren, seperti Partai Golkar, Nasdem, PDI-P, Hanura dan termasuk juga PKS yang merepresentasikan sebagai partai Islam dengan pola keagamaan yang berbeda dengan pola keagamaan ala pesantren. Namun demikian, keterlibatan kalangan pesantren tersebut, diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif dalam mengawal demokrasi yang bermoral, karena pesantren telah memberikan pencerahan dengan pendidikan moral yang sangat kuat. Di tangan kalangan politisi pesantren, demokrasi akan berjalan sesuai dengan semangat oleh rakyat, untuk rakyat dari rakyat. Inilah demokrasi yang substansial, dan bhindhara memiliki tanggungjawab untuk mewujudkannya. Menurut Abd. A'la bahwa:

“Demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang mampu menangkap kearifan dan pandangan-pandangan moral seluruh masyarakat, bahkan seluruh umat manusia sehingga menjadi proses pemanusiaan manusia. Ketika masyarakat

telah sepakat untuk menolak kekerasan, tapi kekerasan tetap dilakukan, maka keputusan itu adalah tidak demokratis dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai moral yang humanistik” (A'la, 2009, 135).

Banyak penelitian mengenai hubungan santri dan Kiai di dalam Politik sebelumnya dari yang tergolong klasik hingga yang kontemporer antara lain karya Zamroni (2016), (Syarif 2016),(Ma'arif 2004),(Mas'ud 2004). Dari berbagai kajian di atas, kajian mengenai pola hubungan santri dan Kiai yang ada dirasa perlu ditambahkan narasi mengenai etika *acabis* yang merupakan kearifan lokal asli santri Madura yang saat ini menjadi politikus di berbagai partai politik yang ada di Indonesia ke dalam karya-karya. Setiap keputusan yang diambil oleh setiap warga pesantren bergantung pada restu Kiai, mereka berusaha tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dihadapan Kiai (Ma'arif 2004,276). Istilah *acabis* (*sowan*) adalah perwujudan sikap '*tawadhu*' dan menghormati kiai yang menjadi ajaran pesantren, restu dari Kiai dibutuhkan agar selamat dunia akhirat termasuk dalam berpraktik politik.

Sejarah perpolitikan kyai Indonesia sangat berpengaruh didalam perselisihan partai politik tahun 1980 an, maka aspirasi politik Kiai di dalam partai politik dapat mempengaruhi pengikutnya sebagai fatwa politik(Maunah 2009). Namun saat ini, perilaku Politik santri berubah seiring dengan perkembangan jaman. Globalisasi informasi mengakibatkan perubahan perilaku kepatuhan santri terhadap Kyai. Santri saat ini hanya mengikuti fatwa Kyai dalam bidang agama dan bukan politik. Fatwa politik kyai menjadi lemah disebabkan kasus-kasus pemilu Indonesia, baik pemilu legislatif maupun Pemilihan Presiden yang merubah persepsi santri (Maunah 2009). Meski berbeda dalam pilihan politik namun tradisi *acabis* (*sowan*) masih ada sebagai bentuk '*takdzim*' kepada gurunya sesuai dengan falsafah Madura *Bhuppa' Bhâbhu' Ghuru Rato. Kepatuhan terhadap*

seorang *ghuru* (guru) di Madura atau Kyai (bindhara) tidak dapat dipisahkan sesuai dengan ayat Alqur'an *Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum yang bermakna: "Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.*(Al- Qur'an, An Nisa, 59).

Budaya *acabis* (*sowan*) kepada kiai yang dilakukan oleh santri yang telah menjabat status sosial tertentu, sebagai tokoh masyarakat, birokrat, pejabat publik, maupun politisi, dalam prakteknya tetap dilakukan dengan penuh *andhap asor* dan penuh keikhlasan yang sangat dalam. *Acabis* yang dilakukan oleh santri sejatinya tidak hanya menjadi momentum, santri bertemu kiai, melainkan lebih dari sekedar itu, kedatangan santri kerap kali untuk meminta doa' nasehat ataupun pertimbangan untuk satu aktivitas tertentu yang akan dilakukan. Petunjuk *Kiai*, biasanya dijadikan sebagai pertimbangan utama sebelum dilakukan keputusan atas masalah yang dihadapi.

Kearifan lokal dan tradisi budaya Madura sangat penting untuk direkonstruksi dalam rangka menemukan ke aslian budaya yang saat ini di dominasi oleh modernisme. Tradisi lokal menjadi terasingkan bahkan terkubur, sehingga demikian banyak orang Madura yang tidak mengenal jati diri asli budaya lokalnya. Masyarakat Madura pun tidak luput dari fenomena demikian. Secara kasat mata, sudah sedemikian banyak nilai-nilai luhur Madura hilang dari sosok kepribadian generasi muda (Hidayat 2012). Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, kajian ini akan memfokuskan perhatian pada beberapa hal. Pertama, adalah pada santri yang berpolitik yang tetap mengedepankan *acabis* (*sowan*) kepada Kiai sebagai penasihat didalam relasinya dalam berpolitik didalam kebudayaan Madura. Kedua sikap dan cara politisi pesantren memposisikan kiai memperkuat posisi dirinya sebagai politisi berlatar belakang pesantren.

Kiai secara etimologis berasal dari kata 'iki wae', yang dapat diartikan 'orang terpilih'. Ini

menunjukkan bahwa kiai dianggap istimewa karena mereka pilihan Allah SWT. Istilah Kiai adalah sebutan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang yang memiliki kualitas di atas rata-rata (Bull dan Lukens, 2004). Terdapat dua faktor utama yang menjadikan kiai mendapatkan derajat sosial atau penghormatan tinggi di dalam suatu masyarakat. Pertama, kiai memiliki pengetahuan dalam bidang agama yang luas sehingga menjadikan mereka sebagai sumber pemahaman keagamaan masyarakat. Kedua, pada umumnya para kiai biasanya dari kalangan menengah ke atas. Mereka memiliki sumber daya ekonomi yang melebihi penduduk desa pada umumnya. Dua faktor ini saling mendukung kiai menjadi elit di Desa (Turmudi 2004). Di Madura pengakuan masyarakat memiliki peran yang lebih menentukan berkaitan dengan keulamaan seseorang daripada sekedar faktor geneologis. Dengan demikian tingkatan kiai didasarkan bukan pada keturunan tetapi pada kualitas (Turmudi 2004).

Perbedaan pilihan politik praktis yang dilakukan oleh santri dalam konteks politik dengan kiai, tentu saja menjadi fenomena lain ketika dihubungkan dengan logika kepatuhan terhadap guru sebagaimana telah diajarkan dalam tradisi pesantren dan masyarakat Madura secara umum. Karena bagaimanapun, mengambil jalan berbeda antara santri dengan kiai, sejatinya merupakan gambaran dari perilaku yang kurang lumrah, karena santri telah memiliki kaidah-kaidah kepatuhan yang tidak tertulis untuk patuh terhadap kiai sebagai bentuk penghormatan terhadap guru yang telah membesarkannya dengan ilmu pengetahuan ala pesantren. Artinya, sehebat apapun seorang santri setelah kembali ke masyarakat, penghormatan terhadap guru di pesantren tetap terjaga dengan baik, sehingga tradisi *acabis* (*sowan*) dalam kondisi tertentu kepada kiainya,

menggambarkan tentang ikatan emosi yang kuat antara kiai dengan santri.

Dalam konteks itu, memahami perilaku politik politisi pesantren memiliki relevansi, ketika dihadapkan pada masalah ikatan emosional antara guru-murid dalam konteks pergulatan politik. Etika dan kaidah-kaidah penghormatan terhadap guru menjadi penting dimaknai, karena keterlibatan politisi pesantren dalam “rimba politik” bisa menyebabkan perubahan paradigma tentang hubungan kiai-santri yang sangat fatal. Atas dasar gambaran tersebut, kajian ini dapat dipetakan menjadi beberapa masalah. *Pertama*, bagaimana konsep etis relasi guru-murid dalam konteks pesantren dan kebudayaan Madura? *Kedua*, Bagaimana sikap dan cara politisi pesantren memposisikan kiai memperkuat posisi dirinya sebagai politisi berlatar belakang pesantren?

Tradisi acabis (Sowan) merupakan salah satu bentuk persepsi etis dari suatu tindakan politik seseorang yang di dalam kajian ini adalah santri. Norma-norma yang berlaku dalam pesantren yaitu takdzim atau hormat terhadap Kyai merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan menurut relasi *Ghuru* dan murid. Tradisi etika acabis (sowan) akan menjelaskan kearifan politisi pesantren Madura yang berbeda sehingga menjadi politisi moral bukan moralitas politik yang hanya mengedepankan kepentingan politik (Hidayat 2012). Dunia politik dan etika sangat berkaitan untuk mewujudkan nilai norma yang ada di masyarakat yang dianggap ideal. Tingkah laku yang sesuai norma merupakan cerminan dari apa yang ada dalam alam pikiran seseorang, maka acabis merupakan bagian dari karakter santri Madura yang sebenarnya juga berdimensi etis dalam konteks kehidupan bermasyarakat dalam konteks perilaku politik santri Madura (Hidayat 2012)

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), dengan beberapa

model pengumpulan data, yang meliputi observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan metode dokumentasi. Penentuan populasi dan sampel ditetapkan sebagai narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *snow-ball*, yaitu penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi (Vismaia dan Syamsudin 2007, 75). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti berpartisipasi secara langsung di dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat (Maros 2016). Sementara, teknik analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menggambarkan tentang kategori-kategori yang ditemukan dan muncul dari data yang ada sehingga dapat melahirkan analisis yang obyektif tentang upaya santri politik guna menginternalisasi nilai-nilai pesantren dalam dunia politik yang dilakukannya. Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi (*participant observation*), dan wawancara mendalam (*indepth interview*) Dalam hal ini, peneliti terlibat secara langsung dalam melakukan interview kepada praktisi politik yang dahulu merupakan santri pesantren.

Acabis untuk Restu Politik : Legitimasi Sang Kiai untuk Sang Murid

Politik identik dengan perebutan kekuasaan dan kompetisi memenangkan kepentingan. Dalam politik kerap kali diberlakukan hukum “yang cerdik, ia yang menang”, walaupun dengan menggunakan cara-cara yang berlawanan dengan moralitas agama. Moralitas politik memiliki cara pandangnya sendiri dan pada gilirannya mampu mengalahkan moralitas agama. Akibatnya, dunia politik selalu diibaratkan sebagai dunia kotor yang sulit disucikan, tetapi bukan berarti tidak bisa

disucikan, karena kotor dan tidaknya dunia politik, sangat ditentukan oleh perilaku para politisi di dalamnya. Maka, kehadiran santri dalam dinamika politik praktis, pada gilirannya memberikan harapan baru tentang dunia kelam politik, karena santri telah dibentuk melalui proses pendidikan keagamaan yang kuat.

Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa santri di Madura memang selalu menjadi aktor penting dalam dinamika sosial politik yang berkembang, seperti yang pernah diungkapkan oleh Heather Sutherland, bahwa kalangan santri adalah sumber terpenting (pembentukan) opini dan kepemimpinan dalam masyarakat Nusantara, terutama di daerah-daerah yang kuat Islamnya di Pesisir [utara Jawa], Banten dan Madura di Jawa Timur (Baso 2012, 191).

Yang menarik, pergulatan politik kalangan politisi pesantren telah membuka cakrawala baru perpolitikan yang terjadi, karena kehadiran politisi pesantren telah berhasil meruntuhkan dominasi politisi di luar pesantren. Jabatan elit partai, secara faktual telah banyak yang dipegang oleh politisi pesantren, sehingga perilaku partai seyognya dapat dikendalikan oleh cara pandang santri. Nyaris, jabatan strategis semua partai yang ada di Madura, berada di tangan kalangan politisi pesantren.

Namun demikian, karakter politisi pesantren memang berbeda dengan politisi lainnya, terutama ketika di hadapkan pada pilihan politik yang berbeda dengan kiai (gurunya ketika masih di pesantren). Bahkan untuk memastikan pilihan politik akan menjadi tempat berlabuh, kalangan politisi pesantren, terlebih dahulu meminta restu dan masukan kepada kiai di pesantren. Hal itu dilakukan, bukan hanya sekedar untuk memantapkan keyakinan atas pilihan politiknya, melainkan juga untuk mendapatkan barokah dari kiai yang bersangkutan. Sebab, pola hubungan antara kiai dengan santri, lebih didasarkan pada pola hubungan guru-murid yang sangat esensial dan unik, sebagaimana telah

menjadi fenomena di kalangan masyarakat pesantren di tanah Jawa, bahkan juga di Madura. Abdurrahman Mas'ud menulis bahwa Jawa pada abad XIX M. Menyaksikan kepemimpinan kiai dalam pesantren demikian unik, dalam arti menjaga ciri-ciri tradisional pramodern seperti hubungan intim guru-murid yang didasarkan lebih pada suatu sistem kepercayaan daripada hubungan *patron-client* yang berkembang luas di masyarakat. Para santri menerima kepemimpinan kiai karena percaya pada konsep dalam masyarakat Jawa, yaitu *berkah* atau *baraka* yang didasarkan atas doktrin keistimewaan status seseorang *alim* dan wali (Mas'ud 2004).

Secara garis besar, restu politik yang didapatkan oleh politisi pesantren dari kiai, dapat dipetakan menjadi dua hal, yaitu restu langsung kiai dan restu melalui putra kiai.

Restu Langsung Kiai

Bagi kalangan masyarakat pesantren, berkomunikasi dengan kiai dalam setiap aktivitas yang dilakukan atau yang akan dilakukan, hal yang sudah menjadi karakteristik yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana banyak teori yang menjelaskan bahwa kiai pesantren menjadi teladan dan panutan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, sehingga penghormatan terhadap mereka, menjadi sesuatu yang niscaya dilakukan, termasuk oleh politisi pesantren. Jadi, menghargai dan menghormati kiai tetap menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka.

Salah seorang politisi pesantren, Alanwari misalnya, sebelum pindah dari PKB ke PKS, ia terlebih dahulu sowan ke pesantren yang menjadi tempat dirinya digembleng dulu untuk meminta petunjuk terhadap guru spiritualnya, sehingga partai politik yang akan dijadikan tempat untuk berjuang, bisa relevan dengan pilihan hatinya. Yang jauh lebih penting adalah, ia

tidak salah dalam memilih partai, sehingga dapat mengantarkannya mencapai impian politiknya. Menurutnya, hijrah politik yang dilakukannya dari PKB ke PKS, sejatinya dilakukan setelah berkonsultasi dengan kiaiinya.

“Ini saya juga hasil konsultasi, ketika saya sudah ruwet akibat Pilkada Pamekasan 2013 dan saya harus menunjukkan eksistensi bahwa Anwari bukan orang yang tak layak untuk dijual, saya harus keluar dari barisan saya (PKB, pen), kalau saya jadi anggota dewan lagi, orang akan menyatakan macam-macam dan lain sebagainya. Jadi, saya harus keluar, kemudian saya konsultasi dengan guru spritual saya almarhum Kiai Basyir di Pesantren Guluk-Guluk. Saya *mator* ke beliau, saya bilang “*abdina kagdintoh mau keluar dari PKB, mohon dhabu*”. Kemudian, beliau bilang sama saya “*dhe’emma’ah bekna*”. Abdina sudah ada ketidaksamaan sikap dengan teman-teman yang ada di dalam, sehingga abdina merasa tidak kerasan. Waktu beliau bilang “*nyare partai Islam*”. Setelah itu, saya hitung-hitung partai-partai Islam yang ada, tetapi setelah saya juga konsultasi dengan tokoh spritual saya yang lain, beliau menyarankan saya pindah ke PKS, tetapi saya tetap orang NU”. (Anwari 2017)

Ungkapan di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa keputusan politik yang dilakukan oleh santri, dilakukan setelah dirinya mendapatkan masukan dan petunjuk dari kiai sebagai guru spritualnya. Apa yang dilakukan oleh Alanwari sebagai santri, tetap menjadikan budaya *acabis* sebagai jalan menemukan kejelasan arah politik yang akan dilakoninya. Keputusannya, hijrah politik dari PKB yang notabene partai berbasis pesantren ke PKS, dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan arahan penting dari kiaiinya.

M. Khalq Kr, juga mengakui bahwa pilihan politik yang dilakukannya dengan memilih PKB

sebagai partainya, padahal gurunya di pesantren memilih PPP sebagai wadah perjuangannya, tidak bisa dilepaskan dari restu yang telah diberikan oleh gurunya tersebut. Khalqi aktif di PKB, telah mendapatkan legitimasi melalui restu yang diberikan oleh KH. A. Waris Ilyas sebagai tokoh PPP di Kabupaten Sumenep. Menurutnya :

“Ketika saya ijin masuk PKB, beliau merestui saya. Beliau berpesan kepada saya “berpolitik, jangan main-main”. (wawancara, 26 Juni 2017) (Anwari 2017)

Ungkapan Khalqi di atas, jelas memberikan isyarat tentang sebuah restu yang diberikan oleh gurunya kepada santri. Bahwa menjadi politisi itu, tidak hanya sekedar berpolitik, melainkan dibutuhkan keseriusan, sebagaimana pesan KH. A. Waris Ilyas terhadap santrinya yang secara politik berbeda arah. Ikatan emosional guru-murid sebagaimana dialami oleh kalangan politisi pesantren tersebut, menegaskan dengan nyata tentang karakter khas pesantren yang tetap dipegang dengan kuat oleh kalangan santri yang memilih jalur politik, sekalipun harus berbeda partai dengan kiai yang telah memberikan ilmu dan keteladanan selama berada di pesantren.

Restu Melalui Putra Kiai

Berbeda hal dengan cara yang dilakukan oleh kedua politisi di atas, yang secara langsung acabis secara fisik dengan kiaiinya di pesantren untuk mendapatkan petunjuk. Pada bagian ini, politisi pesantren yang lain memiliki pengalaman bentuk lain untuk memperkuat keyakinannya dalam memilih partai politik yang akan menjadi kendaraan politiknya. Khusus dalam bagian ini, politik restu kiai dilakukan tidak secara langsung meminta ijin kepada kiai, melainkan melalui putra kiai (*lora*) di pesantren. Artinya, politisi pesantren ini, tetap mengkomunikasikan pilihan politiknya dengan unsur pesantren sebagai tempat menimba ilmu, karena bisa jadi dalam keyakinan politisi ini, putra kiai juga merupakan

bagian dari kiai. Apalagi, dalam ajaran pendidikan pesantren, diyakini bahwa guru yang harus dihormati, bukan hanya kiai saja, tetapi putra kiai juga secara otomatis terposisi sebagai guru yang harus dihormati.

Di mata kalangan politisi pesantren tersebut, kharisma dan kewibawaan kiai tetap memiliki daya tarik yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai bentuk bagian dari etika politik seorang santri terhadap guru, perilaku politik dan pilihan partai politik yang menjadi keyakinannya, tetap berkomunikasi dengan baik terhadap putra kiai. Hal itu dilakukan bahwa jalan politik yang dijalaninya, telah mendapatkan restu dari kalangan pesantren yang telah membesarkannya.

Hal itu misalnya diakui oleh A. Tirmidzi Mas'ud dan Abrari yang sama-sama pernah belajar di pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk. Kedua politisi ini memiliki jalan politik yang berbeda, termasuk berbeda dengan kiai yang telah meyakini partai politik lain sebagai sarana perjuangannya. A. Tirmidzi Mas'ud memilih partai Nasdem, sementara gurunya KH.A. Waris Ilyas, termasuk tokoh PPP di Kabupaten Sumenep. Sementara Abrari memilih PDIP, berbeda jalan politik dengan KH. Ahmad Basyir AS (alm) yang notabene gurunya yang telah membesarkannya di PP. An-Nuayah Latee.

Menurut Abrari, bahwa :

“Kalau dengan almarhum (KH. Ahmad Basyir AS, pen) tidak (pernah berkomunikasi, pen), tapi kalau dengan putra-putranya, saya berkomunikasi. Dengan KH. A. Waris Ilyas, saya komunikasi, dengan putranya KH. Ahmad Basyir, saya juga komunikasi. Saya menyampaikan maaf sekiranya keyakinan politik saya dianggap keliru, tetapi ini semua adalah pilihan saya”. (Anwari 2017).

Demikian juga yang dialami oleh A. Tirmidzi Mas'ud, bahwa pilihan politik yang dipilihnya, sudah mendapatkan “restu” dari kiai di pesantren, walaupun restu tersebut ia dapatkan

dengan sikap yang halus dari keluarga kiai di pesantren. Ia menyatakan bahwa :

“Sampai hari ini, hubungan saya dengan keluarga *dhalem* (keluarga kiai, pen), misalnya putra kiai, justru masih sangat dekat sekali. Bahkan, setiap kali bertemu saya, bahkan salah satu putra kiai selalu tanya, dalam minggu ini, saya ketemu kiai, beliau menyampaikan pertanyaan “*kadiponapa terros sampean di Partai Nasdem*”. Maksud istilah “*terros*” ini, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh seorang tokoh tentang kemungkinan saya menjadi ketua DPD Nasdem Sumenep. Jadi, beliau sangat *welcome*. Saya tidak mau mengatakan beliau telah mengizinkan arah politik saya, tetapi tidak ada kata perintah maupun larangan dari beliau. Justru beliau berharap, Sumenep harus dipegang oleh masyarakat pesantren”. (Anwari 2017)

Restu kiai dalam konteks itu menjadi salah satu karakteristik santri yang sangat substansial dan telah mendarah daging dalam masyarakat santri, baik di dalam kompleks pesantren sendiri, maupun masyarakat santri di luar pesantren. Dengan *acabis* atau berkomunikasi dengan keluarga kiai, seorang politisi pesantren telah memastikan jati dirinya sebagai individu yang tetap menjaga ikatan keilmuan dengan kiai. Bahkan, dengan *acabis* kepada kiai, seorang santri politik telah melakukan langkah yang tepat untuk mendapatkan legitimasi dari kiai akan politik yang akan geluti. Apalagi, posisi kiai dalam konteks masyarakat Indonesia memang kerap kali dapat memberikan legitimasi yang kuat, termasuk legitimasi dalam pemerintahan dan kekuasaan. Tentang legitimasi sosial kiai, tergambar dalam tulisan Yatimul Ainun :

“Dari perspektif pemerintahan, kekuasaan kiai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan sosial politik masyarakat. Seperti di Indonesia, membutuhkan legitimasi kiai untuk

melakukan hal-hal duniawi mereka karena kiai telah memegang posisi penting sejak kedatangan Islam di Indonesia beberapa kiai terkenal sudah terlibat dalam masalah-masalah pemerintahan. Hubungan antara kiai dengan masyarakat telah terlembaga melalui norma-norma *patron-klien* (Hidayat 2012,53).

Konsep Moralitas dalam Terminologi Kebudayaan Madura

Perilaku politik yang dibangun oleh kalangan politisi pesantren tersebut memberikan gambaran tentang pola komunikasi yang secara substansial tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai luhur kebudayaan Madura. Sebuah perilaku politik yang menempatkan seorang guru pesantren sebagai kiblat dan rujukan dari tindakan politik yang akan dilakukan. Ikatan emosi guru-murid telah menjadi kekuatan dalam praktiknya tetap melandasi aksi-aksi politik yang dilakukan. Bahkan, perbedaan arah politik antara santri dan guru, tidak menjadikannya sebagai penghalang untuk saling menjauh. Santri tetap datang menghadap kiai dan meminta restu atas arah politik yang dilakukannya, sekalipun harus berbeda dengan kiai.

Penghormatan terhadap kiai oleh kalangan politisi tersebut, jelas menunjukkan tentang kuatnya nilai-nilai kearifan lokal yang dipegang dan dijadikan sebagai kekuatan dalam relasi guru-murid. Kiai adalah guru yang harus diposisikan sebagai pijakan dalam beraktivitas, termasuk aktivitas politik. Hal itu relevan dengan ajaran dalam khazanah kebudayaan Madura, yang tertuang dalam sebuah narasi penuh makna, yaitu “*bhuppa’ bhabhu’, ghuru, rato’*”. Orang Madura menempatkan kiai (guru) pada posisi kedua setelah kedua orang tua untuk dita’ati dan dihormati, setelah itu berulah seorang penguasa.

“Figur *ghuru* dalam konteks kehidupan budaya Madura berfungsi dan berperan sebagai figur panutan sekaligus rujukan tentang segala hal yang berkaitan dengan aspek-aspek moralitas dan keagamaan. Dengan demikian, dalam pandangan dunia (*world view*) orang Madura figur *ghuru* lebih merupakan representasi tentang kehidupan “*ukhrowi*” (*sacred world*) (Wiyata 2013,13).

Posisi kiai sebagai guru di mata kalangan politisi pesantren, secara faktual memberikan penjelasan tentang karakteristik perilaku politik kalangan politisi pesantren dalam memosisikan kiai-nya, bukan hanya sebatas guru, melainkan sebagai pegangan dalam menjalankan arah politiknya. *Dhabu* seorang kiai, tetap dijadikan sebagai pertimbangan khusus oleh kalangan politisi pesantren tanpa harus memikirkan perbedaan arah politik. Hal itu juga menegaskan bahwa politisi pesantren, sejatinya tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kiai sebagai guru dan panutan yang harus dihormati dan *dhabu*-nya sebagai petunjuk sangat penting.

Dalam konteks itu, tradisi *acabis* dengan segala tujuannya yang dilakukan secara khusus oleh kalangan politisi pesantren, bukan hanya sebatas silaturahmi antara seorang murid dengan guru, melainkan yang sangat substansial adalah bahwa politisi pesantren tetap memiliki keyakinan bahwa sosok kiai masih menjadi idola kehidupan bagi mereka. Arah politik bisa saja berbeda, tetapi ikatan emosional dan ikatan keilmuan, tidak bisa dibatasi oleh posisi, jabatan dan partai apapun. Terkait dengan budaya *acabis*, A. Latif Wiyata menulis :

“Setiap saat kiai (*keyae*) selalu mendapatkan kunjungan orang-orang (*nyabis*), baik dari dalam lingkungan desa setempat maupun dari berbagai wilayah Kabupaten lain, termasuk dari luar Madura yang minta berkah untuk keselamatan”(Wiyata 2013:49)

Oleh karena itu, yang dilakukan oleh politisi pesantren tersebut, di satu sisi menjadi

gambaran tentang sikap kesopnan dan *andhap asor* seorang santri terhadap kiai yang telah memberikan banyak pengetahuan dan agama. Apalagi, dalam tradisi masyarakat Madura, kesopnan harus dijunjung setinggi-tingginya. Bahkan, ajaran kesopnan dijadikan sebagai ajaran yang sangat dominan ditanamkan dalam kehidupan keluarga masyarakat Madura. Karena kesopnan pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari kontekstualisasi ajaran agama yang sangat serius menjadikan akhlak dan kesopnan sebagai ajaran luhur.

“Salah satu tradisi yang amat penting bagi masyarakat Madura adalah menjunjung tinggi kesopnan. Seseorang dituntut bersifat “*andhap asor*”, rendah hati terhadap sesama. Walau beredar anggapan tentang masyarakat Madura sebagai orang-orang yang sangat kasar, namun mereka sebetulnya sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopnan” (Djauhari 2008,17).

Dalam kerangka itu, politik kalangan *bhindhara* sejatinya merupakan ekspresi dari politik Islam yang *genuine*, yaitu perilaku politik yang didasarkan pada landasan moralitas keagamaan yang kuat, sehingga arah politik yang dilakukan tidak hanya sekedar untuk mencapai sesuatu yang bersifat duniawi, melainkan yang jauh lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Politik Islam adalah politik yang benar-benar mengadopsi segala ajaran yang menjadi misi kedatangan Islam.

“Politik yang dimaksudkan Islam jelas adalah politik yang berperadaban, bermoral, humanis, dan tidak menghalalkan segala cara. Seperti inilah yang dirumuskan oleh para ulama sebagai kaidah *fiqhiyah* “*tasharruful imam ala al-ra’iyah mantuhun bil*

mashlahah (kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan atas rakyat haruslah senantiasa mengedepankan kemaslahatan). Dengan demikian, dinamika kehidupan suatu negara, standarnya dilihat dari efektivitas penyelenggara negara dalam mengimplementasikan aspirasi warganya” (Siroj 2006,125-126).

Penutup

Dalam kerangka itu, politisi pesantren dalam melakukan kegiatan politik, memang memiliki karakteristik yang khas, terutama dalam menjaga kesopnan dalam berpolitik. *Pertama*, politisi pesantren adalah tetap *istiqomah* dalam menjadikan nilai kearifan lokal sebagai dasar berpolitik, sesuai dengan konsep *Buppa’ Bappu’, guruh, ratoh* telah menjadi bagian integral dalam setiap langkah politik yang dilakukan. Relasi guru-murid tetap menjadi pijakan bagi kalangan politisi pesantren dan tidak ternafikan, walaupun antara santri tersebut memiliki ketidaksamaan politik dengan kiaiinya. Akan tetapi, hubungan guru-murid tetap terjalin dengan baik, karena karena politik santri ternyata tetap diikat oleh tradisi kesopnan yang sangat tinggi.

Kedua, kalangan politisi pesantren memposisikan seorang kiai tetap sebagai guru yang bisa menganyomi dan memberikan bimbingan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Kalangan politisi pesantren, tetap menjadikan restu kiai sebagai kekuatan dalam setiap langkah dan gerak politik yang dilakukan. Hal itu dalam derajat tertentu, semakin menunjukkan tentang tingkat kepatuhan seorang santri terhadap kiai, sehingga perilaku politik yang geluti tetap didasarkan pada arahan dan pertimbangan seorang kiai yang telah membesarkannya selama berada di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. 2009. *Agama tanpa penganut : memudarnya nilai-nilai moralitas dan signifikansi pengembangan teologi kritis*. Penerbit Kanisius.
- Al- Qur'an, An Nisa*.
- Baso, Ahmad. 2012. "Pesantren Studies 2a; Buku II: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial; Juz Pertama: Pesantren, Jaringan Pengetahuan dan Karakter Kosmopolitan-Kebangsaannya."
- Bull, Ronald, dan Alan Lukens. 2004. *Jihad Ala Pesantren Di mata Antropolog Amerika*. Yogyakarta: LKiS.
- Djauhari, MT. 2008. "Membangun Madura."
- Hidayat, Ainurohman. 2012. "Karakter Orang Madura Dan Falsafah Politik Lokal." *Karsa: The journal of Social and Islamic Culture* 15(1): 1–14.
- Ma'arif, Syamsul. 2004. "Pola Hubungan Patron-Client Kiai Dan Santri Di Pesantren." *Ta'Dib* 6(2): 87–104.
- Maros, Fadlun. 2016. "PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH) PADA METODE KUALITATIF."
- Mas'ud, Abdurahman. 2004. "Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi."
- Maunah, Binti. 2009. *Tradisi Intelektual Santri*. I. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Siroj, SA. 2006. *Tasawuf sebagai kritik sosial: mengedepankan Islam sebagai inspirasi, bukan aspirasi*.
- Syarif, Zainuddin. 2016. "Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16(2): 293.
- Turmudi, Endang. 2004. "Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan." : 348.
- Vismaia, DS, dan AR Syamsudin. 2007. "Metode Penelitian Pendidikan Bahasa."
- Wiyata, AL. 2013. *Mencari Madura*.
- Zamroni, Imam. 2016. "Juragan, Kiai dan Politik di Madura." *Unisia* 30(65): 264–76.